

Kertak Hanyar, 30 April 2026

Nomor : 196/EXT/DIR/BANK-MITRA/IV/2026
Perihal : Pelaporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola
PT BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) Set

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan A. Yani Km. 8,9 Kec. Kertak Hanyar
Kabupaten Banjar

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 01 Juli 2024 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan :

1. Tanda bukti kirim Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2025 melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
2. Tanda terima dari Penghimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) atas Laporan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2025
3. Tanda terima dari Majalah Media BPR atas Laporan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2025.
4. Bukti telah diinformasikan Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2025 pada website <https://bankmitra.co.id>

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT BPR MITRATAMA ARTHABUANA
KERTAK HANYAR



M. Hasan Basri
Direktur Kepatuhan

Tembusan :
- Dewan Komisaris PT. BPR Mitratama Arthabuana
- Arsip

Kertak Hanyar, 30 April 2026

Nomor : 197/EXT/DIR/BANK-MITRA/IV/2026
Perihal : Penyampaian Pelaporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola
(Good Corporate Governance) PT BPR Mitratama Arthabuana
Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR

Dengan Hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 01 Juli 2024 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan :

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA
KERTAK HANYAR



M. Hasan Basri
Direktur Kepatuhan

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT. BPR Mitratama Arthabuana
- Arsip

**SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN FILE
LAPORAN TATA KELOLA (CGC)**

Nama BPR : MITRATAMA ARTHABUANA
Tanggal Pengiriman : 30/04/2026

Kami atas nama PT BPR MITRATAMA ARTHABUANA menyatakan bahwa data yang telah dikirimkan ke DPP Perbarindo melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) adalah benar dan valid sesuai yang telah dikirimkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

1. Laporan GCG Tahun 2025
2. Tanda terima pengiriman Laporan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2025

Bila ditemukan data yang tidak sesuai maka pihak MITRATAMA ARTHABUANA bersedia untuk memperbaikinya dan mengirimkan Kembali ke DPP PERBARINDO.

Terimakasih

Kertak Hanyar, 30 April 2026



M. Hasan Basri
Direktur Kepatuhan

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor:

PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Pelaporan:

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039734-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601123-
29042026175641

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

bprmitra@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-29 17:56:41



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2025

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA



www.bankmitra.co.id



KANTOR PUSAT
CABANG BATULICIN
CABANG MARTAPURA
CABANG TANJUNG
CABANG HANDIL BAKTI

: Jl. A. Yani Km 6,3 No. 6 Kertak Hanyar Kab. Banjar
: Jl. Transmigrasi / Plajau Km 2 Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
: Jl. A. Yani Km 39 No. 9 Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar
: Jl. IR P.H.M. Noor RT 001, Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong
: Jl. Trans Kalimantan, Ruko No.2 RT.09 Kel. Hancil Bakti Kec. Alaiak Kab. Barito Kuala

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA
TAHUN 2025**



**JL. A.Yani KM.6,3 No.6 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
TELEPON: 05113255874**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA
Alamat	JL. A.Yani KM.6,3 No.6 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
Nomor Telepon	05113255874

Penjelasan Umum:

Penilaian Tata Kelola (Penerapan Good Corporate Governance) PT. BPR Mitratama Arthabuana secara umum adalah Baik, dengan uraian sebagai berikut:

- Jumlah Direksi Tahun 2025 adalah tiga (3) orang, yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan Non Bank lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
- Jumlah Dewan Komisaris Tahun 2025 adalah empat (4) orang, yang didalamnya terdapat dua (2) orang atau sebanyak 50%(lima puluh persen) dari Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Komisaris Independen. Seluruh Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan.
- Kekurangan satu (1) orang Direktur Bisnis yang masih dalam proses menunggu jadwal Fit & Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Peran aktif Dewan Komisaris akan terus dilakukan dalam hal memonitoring update Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan)
- Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Risiko akan menjadi fokus kami mempertahankan kualitas kredit NPL, dan sektor ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, sehingga diperlukan perbaikan, review, dan evaluasi dalam hal manajemen risiko. Kami terus berusaha untuk meningkatkan dalam penerapan Good Corporate Governance semakin baik lagi, mulai dari pemenuhan struktur organisasi, infrastruktur, update SOP dan kebijakan serta dalam hal aplikasi dan implementasi untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik
--------------------------------------------------------------------------	----------------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Tata Kelola BPR termasuk dalam peringkat 3 (Cukup Baik) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :

- Jumlah Direksi Tahun 2025 adalah 3 (tiga) orang, yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan Non Bank lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
- Jumlah Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang, yang 50% anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Independen. Seluruh Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan.
- Pada Tahun 2025 pemenuhan struktur organisasi yang belum lengkap adalah Direktur Bisnis dikarenakan masih menunggu jadwal Fit dan Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Peran aktif Dewan Komisaris akan terus dilakukan dalam hal me-monitoring update Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan).
- Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Risiko akan menjadi fokus kami mempertahankan kualitas kredit NPL, dan sektor ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, sehingga diperlukan perbaikan, review, dan evaluasi dalam hal manajemen risiko.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Anton Purwanto
	Jabatan	Direktur Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Mitratama Arthabuana.
- Mengelola BPR Mitratama Arthabuana sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR Mitratama Arthabuana dan peraturan perundang-undangan.
- Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Mitratama Arthabuana di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap

- pelaksanaan audit internal BPR Mitratama Arthabuana, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- 5. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, Operasional, dan kegiatan penunjang Operasional
- 6. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Mengungkapkan kebijakan BPR Mitratama Arthabuana yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- 8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 9. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan seluruh kegiatan Operasional di PT. BPR Mitratama Arthabuana.
- 10. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Mitratama Arthabuana.
- 11. Melaksanakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam anggaran dan rencana kerja PT. BPR Mitratama Arthabuana.
- 12. Penyusunan dan penyampaian laporan Pencapaian Target kepada Dewan Komisaris.
- 13. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi dan Pencapaian kepada pemilik melalui RUPS.
- 14. Penyusunan dan penyampaian RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui RUPS.
- 15. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Mitratama Arthabuana kepada pemilik melalui RUPS atas persetujuan Dewan Komisaris.

2.	Nama	Kahar Muzaqir
	Jabatan	Direktur Operasional

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Mitratama Arthabuana bersama-sama dengan Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mempunyai tugas melaksanakan Rencana Kerja serta melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional sehari-hari serta melakukan pembinaan kepada Pegawai.
3. Direktur Operasional mempunyai tugas secara langsung untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas unit kerja yang berhubungan dengan pihak external.
4. Membuat Laporan keuangan secara berkala berkaitan dengan perkembangan PT. BPR Mitratama Arthabuana
5. Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap jalannya Operasional PT. BPR Mitratama Arthabuana.
6. Melaksanakan Koordinasi dengan Pihak terkait yang berhubungan dengan jalannya Operasional.
7. Melaksanakan Pemeliharaan aset milik PT. BPR Mitratama Arthabuana.
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas unit kerja PT. BPR Mitratama Arthabuana.
9. Menyampaikan Informasi yang diperlukan untuk penyusunan RKAT kepada Direktur Utama
10. Mengawasi serta mengarahkan dan membina pegawai demi jalannya Operasional PT. BPR Mitratama Arthabuana
11. Membuat dan mengusulkan Kebijakan yang bersifat temporer demi kelancaran Operasional Bank kepada Direktur Utama
12. Menjadi anggota Komite Kredit
13. Mengangkat, memberhentikan, memberikan sanksi dan atau melakukan mutasi pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPR Mitratama Arthabuana bersama-sama dengan Direktur Utama
14. Menerima usulan atas temuan SPI dan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait
15. Membentuk/Mengangkat/memberhentikan Anggota Komite Kredit
16. Membuat keputusan yang berkaitan dengan jalannya Operasional PT. BPR Mitratama Arthabuana sesuai dengan kewenangannya serta melaporkannya secara tertulis kepada Direktur Utama
17. Mengajukan pembukaan kantor cabang atau kantor kas pelayanan berdasarkan hasil analisa

3.	Nama	Muhammad Hasan Basri
	Jabatan	Direktur Kepatuhan

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Wajib mengetahui, mengerti dan memahami seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan
2. Mampu bekerja secara mandiri dan independen
3. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan di seluruh unit kerja BPR
4. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menerapkan prinsip-prinsip: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF)
5. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas lain seperti Bank Indonesia, PPATK, LPS, Pajak dan lain-lain.
7. Me-review dan merevisi semua SOP, Buku Kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada di BPR agar sesuai dengan POJK, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku saat ini.
8. Menatausahakan semua SOP, Buku Kebijakan, POJK, SEOJK, dan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.
9. Membuat Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan kepada OJK
10. Membuat Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan dan rekomendasi yang berisi informasi umum BPR serta kondisi terkini BPR diantaranya: Pemenuhan Struktur Organisasi, formasi Sumber Daya Manusia, ketentuan, SOP yang telah dimiliki di setiap unit kerja
11. Membuat Laporan dan rekomendasi yang berisi informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan, diantaranya:

pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh unit kerja, termasuk rencana penyesuaian ketentuan internal yang belum sesuai dengan ketentuan yang terbaru dan pemenuhan struktur organisasi/ sumber daya manusia; pelaksanaan komitmen terhadap OJK, BI, PPATK, LPS dan Pajak.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
 2. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
 3. Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
-
1. Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
 2. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Pandu Setia Sukmajaya
	Jabatan	Komisaris Utama
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana. c. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana; 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 3. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 4. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Mitratama Arthabuana 		
2.	Nama	Yuliana Tanzil
	Jabatan	Komisaris
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana. c. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana; 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 3. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 4. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Mitratama Arthabuana 		
3.	Nama	Yoseph Jaya
	Jabatan	Komisaris Independen
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Dalam Mitratama Arthabuana di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi c. melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 		

- strategis BPR Mitratama Arthabuana
- d. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan:
1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana;
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 - e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya.
 - f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 3. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 4. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Mitratama Arthabuana

4.	Nama	Anwari
	Jabatan	Komisaris Independen

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
- b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Dalam Mitratama Arthabuana di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- c. melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana
- d. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan:
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana;
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 - e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya.
 - f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 3. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 4. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Mitratama Arthabuana

Rekomendasi Kepada Direksi:

Rekomendasi kepada Direksi:

- a. Mempercepat atau Follow Up progres hasil Uji Kompetensi dan Kepatutan Direktur Bisnis.
- b. Pemenuhan Kelengkapan Struktur Organisasi yaitu Direktur Bisnis.
- c. Menyetujui penunjukan Ibu Ir. Lilik Hartatik, SE, Ak, CPA, CA, BKP sebagai Audit Laporan Keuangan PT BPR Mitratama Arthabuana Tahun Buku 2025.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1.	Komite	01. Komite Audit
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. b. Evaluasi Kebijakan SKAI dan Akuntansi c. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota yang berasal dari Komisaris Independen (sebagai Ketua) paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi untuk : <ol style="list-style-type: none"> i. Memastikan bahwa komite menjalankan tugasnya secara efektif ii. Memberikan masukan yang relevan pada komite 2) Hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan sendiri dan/atau bekerja sama dengan para Anggota lainnya yang berasal dari Pihak Independen. d. Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek keuangan dan/atau akuntansi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku; 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang

		<p>berlaku;</p> <p>4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5) Menyusun Laporan Komite sesuai dengan yang ditentukan</p> <p>e. Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek hukum dan/ atau perbankan terhadap:</p> <p>1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;</p> <p>2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku;</p>
	Jumlah Rapat	7
	<p>Program Kerja Komite:</p> <p>a. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2025.</p> <p>b. Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2025.</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi hasil audit team SKAI di seluruh kantor cabang sepanjang Tahun 2025.</p> <p>d. Agar memaksimalkan kegiatan pemeriksaan dengan rekrutmen posisi Internal Control Unit (ICU)</p> <p>Realisasi Program Kerja Komite:</p> <p>a. Telah ditunjuk Akuntan Publik (AP) Ibu Ir. Lilik Hartatik, SE, Ak, CPA, CA, BKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono.</p> <p>b. Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2025.</p> <p>c. Tindak lanjut dengan perbaikan atas hasil audit team SKAI di seluruh kantor cabang sepanjang Tahun 2025.</p> <p>d. Telah terpenuhi posisi ICU agar memaksimalkan kegiatan pemeriksaan.</p>	
2.	Komite	02. Komite Pemantau Risiko
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan:</p> <p>1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</p> <p>2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>3) Review laporan posisi profil risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko maupun bagian/seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, tugas dan tanggung jawab masing- masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Anggota yang berasal dari Komisaris Independen (sebagai Ketua) paling kurang melakukan pemantauan untuk:</p> <p>i. Memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab Komite dijalankan dengan semestinya;</p> <p>ii. Memberikan masukan yang relevan kepada Komite.</p> <p>Hal- hal tersebut di atas dapat dilakukan sendiri dan/ atau bekerja sama dengan para Anggota lainnya yang berasal dari Pihak Independen.</p> <p>2) Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian pada bidang keuangan paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek keuangan terhadap:</p> <p>a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</p> <p>b. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>c. Memberikan masukan atas pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komite dari sudut pandang keahliannya di bidang keuangan.</p> <p>3) Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko atau hukum paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek manajemen risiko terhadap:</p> <p>a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</p> <p>b. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>c. Melakukan review atas laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko</p>

	Jumlah Rapat	19
	Program Kerja Komite: a. Pemantauan limit risiko : <ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite • Risk Tolerance b. Pemantauan kredit pihak terkait. c. Evaluasi kinerja dari Direksi. d. Monitoring dan Evaluasi mengenai Manajemen Risiko oleh komite pemantau risiko.	
	Realisasi Program Kerja Komite: a. Pemantauan limit risiko : <ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite • Risk Tolerance b. Persetujuan kredit pihak terkait. c. Evaluasi kinerja Bank. d. Sudah dilakukan pemantauan mengenai Manajemen Risiko oleh komite pemantau risiko.	
3.	Komite	03. Komite Remunerasi dan Nominasi
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Terkait dengan tugas remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab berikut: 1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan sistem remunerasi. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : a. Kebijakan dan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b. Kebijakan dan sistem remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; c. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/ atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Prestasi kerja individual; c. Kewajaran dengan peer group; d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. b. Terkait dengan tugas nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab berikut: 1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi: a. Mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. b. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. 3. Prosedur rekomendasi atas calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi, dan/atau Pihak Independen seperti butir (b) diatas dilakukan sebagai berikut : a. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris, atau calon Direksi, atau calon Pihak Independen. • Penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi, dan rekam jejak (track record) dari para calon. • Selain itu, penilaian dapat dilakukan melalui wawancara dengan calon anggota Dewan Komisaris, atau Calon Direksi, atau calon Pihak Independen;
	Jumlah Rapat	6
	Program Kerja Komite: a. Monitoring tindak lanjut rekomendasi mengenai pemenuhan Direktur Bisnis. b. Monitoring dan evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai tindak lanjut atas laporan FIR on ML/ TF (Financial Integrity Ranting On Money Laundering dan Terrorism Financing).	

Realisasi Program Kerja Komite:

1. Telah terpenuhi posisi Direktur Utama untuk melengkapi struktur organisasi Bank.
2. Telah terpenuhi posisi PE Kepatuhan dan PE Manamajen Risiko & SAF untuk melengkapi struktur organisasi Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

1. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite yang di bawah Komisaris yaitu Komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama Tahun 2025.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

1.	Nama Anggota Komite	Pandu Setia Sukmajaya
	Keahlian	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak
2.	Nama Anggota Komite	Yuliana Tanzil
	Keahlian	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak
3.	Nama Anggota Komite	Yoseph Jaya
	Keahlian	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi
	Jabatan Dalam Komite Audit	01. Ketua Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	01. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
4.	Nama Anggota Komite	Anwari
	Keahlian	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi

		kepada Direksi
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	01. Ketua Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
5.	Nama Anggota Komite	Ali Mas'ud
	Keahlian	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
6.	Nama Anggota Komite	Defie Damayanti
	Keahlian	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	02. Anggota Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Anton Purwanto
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Kahar Muzaqir
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Muhammad Hasan Basri
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Pandu Setia Sukmajaya
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

2.	Nama	Yuliana Tanzil
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Yoseph Jaya
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
4.	Nama	Anwari
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak memiliki saham pada BPR.
 Dewan Komisaris PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak memiliki saham pada BPR.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Anton Purwanto
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Kahar Muzaqir
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Muhammad Hasan Basri
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Pandu Setia Sukmajaya
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Yuliana Tanzil
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Yoseph Jaya
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Nama	Anwari
Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Anggota Direksi PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR.
 Dewan Komisaris PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR.
 Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Anton Purwanto
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Kahar Muzaqir
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Muhammad Hasan Basri
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Pandu Setia Sukmajaya
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Yuliana Tanzil
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Yoseph Jaya
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
4.	Nama	Anwari
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak memiliki saham pada perusahaan lain
 Dewan Komisaris PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak ada memiliki saham pada perusahaan lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	Anton Purwanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Kahar Muzaqir
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Muhammad Hasan Basri
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Pandu Setia Sukmajaya
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Yuliana Tanzil
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Luman Andy - Suami
3.	Nama	Yoseph Jaya
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

4.	Nama	Anwari
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak mempunyai hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lainnya.
 Salah satu Dewan Komisaris mempunyai hubungan keuangan dengan pemegang saham karena merupakan istri dari pemegang saham PT. BPR Mitratama Arthabuana

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Anton Purwanto
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Kahar Muzaqir
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Muhammad Hasan Basri
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Pandu Setia Sukmajaya
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Yuliana Tanzil
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada

	Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Rudy Tanzil - Orang Tua, Luman Andy - Suami
3.	Nama	Yoseph Jaya
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
4.	Nama	Anwari
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi pada PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak ada yang mempunyai hubungan dengan Anggota Direksi lain maupun dengan Dewan Komisaris
 Ibu Yuliana Tanzil memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Rudy Tanzil (Orang Tua) dan Luman Andy (Suami).

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp856.253.726
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp880.750.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp231.677.419
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp361.544.900
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp120.514.967

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	3,04 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	2,18 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,21 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,46 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	3,04 : 1

Perhitungan perbandingan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah selama Tahun 2025

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	02 Januari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai Laporan FIR on ML / TF (Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing) Tahun 2024 dan kebijakan mekanisme Mitigasi Risiko masuknya aliran dana terindikasi hasil TPPU, TPPT, dan PPPSPM.		
2.	Tanggal Rapat	16 Januari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Monitoring dan evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pembahasan penawaran Head Hunter Indonesia perihal proses dan biaya rekrutmen SDM ; Direktur Bisnis, Kabag Kredit, AO Lending Senior, AO Funding Senior, dan Internal Control Unit.		

	Tanggal Rapat	23 Januari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai pembahasan evaluasi Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester 2 Tahun 2024.	
4.	Tanggal Rapat	05 Februari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Audit mengenai pembahasan job description dari bagian Internal Control Unit (ICU).	
5.	Tanggal Rapat	05 Februari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai Grading SDM Tahun 2025 yaitu dari Grade 1 sampai dengan Grade 5.	
6.	Tanggal Rapat	13 Februari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pemenuhan struktur Direksi Bisnis dan interview kandidat untuk posisi Direktur Bisnis atas Nama Mursyid Didiet Hardhono.	
7.	Tanggal Rapat	27 Februari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai pembahasan dan evaluasi SOP Pengembangan Sumber Daya Manusia dan SOP Rahasia Bank.	
8.	Tanggal Rapat	06 Maret 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai penerapan manajemen risiko dan penilaian risiko appetite dan risiko tolerance.	
9.	Tanggal Rapat	06 Maret 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai skema penetapan grade dan penggolongan penggajian karyawan.	
10.	Tanggal Rapat	13 Maret 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Audit mengenai hasil LHP dari SKAI di Cabang Batulicin periode Agustus 2024 sampai dengan Januari 2025 dengan hasil Need Improvement High.	
11.	Tanggal Rapat	13 Maret 2025
	Jumlah Peserta	4 orang

	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengkajian ulang terhadap pedoman kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.	
12.	Tanggal Rapat	20 Maret 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai pelaporan NPL kredit dikelompokkan percabang dan telah ditentukan format pelaporan jaminan kredit yang belum diambil.	
13.	Tanggal Rapat	10 April 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pemenuhan Struktur Direktur Bisnis dan PE Kepatuhan.	
14.	Tanggal Rapat	17 April 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai peraturan perusahaan perihal yang menjadi hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan.	
15.	Tanggal Rapat	24 April 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai perkembangan pencapaian target lending cabang dan pipeline Bulan Mei Tahun 2025. Diharapkan seluruh PUK Cabang mengejar target yang sudah ditetapkan pada RBB.	
16.	Tanggal Rapat	08 Mei 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai perkembangan pencapaian target funding dan program tabungan arisan.	
17.	Tanggal Rapat	26 Juni 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Audit mengenai hasil LHP dari SKAI pada Kantor Cabang Tanjung periode November 2024 sampai dengan Maret 2025. Diharapkan PUK dan karyawan memahami prosedur dan SOP yang ada dengan baik dan bekerja dengan teliti sehingga meningkatkan tata kelola yang baik.	
18.	Tanggal Rapat	04 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai pembahasan SOP Mitra Mobile Banking (MiMo). Diharapkan dengan adanya layanan MiMo akan memudahkan transaksi layanan nasabah sehingga meningkatkan pertumbuhan bisnis.	
19.	Tanggal Rapat	09 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Audit mengenai hasil LHP dari pemeriksaan OJK Periode Juni 2025. Adapun salah satu	

	yang menjadi perhatian adalah memastikan penyelesaian rencana penanganan kredit bermasalah yang disusun sesuai target penyelesaian disertai dengan kunjungan kepada debitur yang dilengkapi dengan bukti komitmen penyelesaian dari debitur.	
20.	Tanggal Rapat	24 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring oleh Komite Pemantau Risiko mengenai evaluasi terhadap analisa kredit dengan nominal >5M agar memaksimalkan analisa 3 pilar dan evaluasi terhadap seluruh analisa kredit dan PUK cabang agar menerapkan SOP dengan penuh tanggung jawab.	
21.	Tanggal Rapat	24 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Audit mengenai pembahasan review terhadap laporan pokok-pokok hasil audit semester I periode Januari 2025 sampai dengan Juni 2025 yang dilaporkan ke OJK.	
22.	Tanggal Rapat	07 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring oleh Komite Pemantau Risiko mengenai pembahasan review SOP APUPPT dan PPPSPM Tahun 2025 dengan tambahan evaluasi parameter redflag, mekanisme sosialisasi, dan parameter transaksi keuangan.	
23.	Tanggal Rapat	04 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Audit mengenai pembahasan LHP OJK Tahun 2025 yang harus diselesaikan sesuai target date dari OJK dan penunjukan PIC yang bertanggung jawab terhadap temuan.	
24.	Tanggal Rapat	04 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai kekurangan dalam penerapan program APUPPT dan PPPSPM pada Financial Integrated Risk (FIR) yang harus diperbaiki dalam hal kebijakan maupun proses penerapannya.	
25.	Tanggal Rapat	11 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai review SOP Pelindungan Konsumen dengan beberapa tambahan poin seperti ketentuan pelindungan konsumen yang diterapkan dan informasi mengenai produk.	
26.	Tanggal Rapat	18 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai penerapan manajemen risiko dan penilaian risiko appetite dan risiko tolerance. Menetapkan sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas dalam penerapan manajemen risiko kredit. Penilaian tersebut paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian terhadap akurasi pemantauan risiko kredit, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau pegawai yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual.	
27.	Tanggal Rapat	25 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	

	Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai review SOP Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Tahun 2025 agar disosialisasikan dengan baik kepada seluruh karyawan sehingga dipahami dan dipatuhi SOP tersebut.	
28.	Tanggal Rapat	03 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai laporan non performance loan (NPL) agar dibuatkan langkah-langkah untuk mencapai angka dibawah 5%.	
29.	Tanggal Rapat	16 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai proses pengajuan perizinan Mitra Mobile Banking (MiMo) dari OJK dan BI yang akan dilakukan oleh PT. PITSI (Pilar Teknotama Sinergi).	
30.	Tanggal Rapat	13 November 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai pedoman SOP Internal Control Unit (ICU). Dengan adanya SOP ICU maka diharapkan meningkatkan tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan OJK.	
31.	Tanggal Rapat	10 Desember 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai review assesment Kabag Funding yang akan dipenuhi Tahun 2026 dan review form aktivitas bisnis.	
32.	Tanggal Rapat	18 Desember 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Monitoring dan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai hasil nilai FIR dari PPAK dengan rekomendasi diperlukan kebijakan penerapan system pemantauan transaksi nasabah secara otomatis dan memperbanyak data dan informasi dari luar sistem / database untuk dilakukan secara konsisten.	

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Pandu Setia Sukmajaya
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	32 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Yuliana Tanzil
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	32 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
3.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Yoseph Jaya
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	32 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
4.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anwari

Frekuensi Kehadiran (Fisik)	32 kali hadir
Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 32 kali dalam setahun.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Tidak ada fraud pada PT. BPR Mitratama Arthabuana

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nana Prihatynah Djauhari
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Kepala Divisi Operasional

	Nama Pengambil Keputusan	Anton Purwanto
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Bisnis
	Jenis Transaksi	Perjanjian Kredit Tanggal 08/01/2025
	Nilai Transaksi	Rp77.000.000
	Keterangan: Kredit Konsumtif dengan jaminan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1134.	
2.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nana Prihatynah Djauhari
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Kepala Divisi Operasional
	Nama Pengambil Keputusan	Anton Purwanto
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama
	Jenis Transaksi	Perjanjian Kredit Tanggal 03/09/2025
	Nilai Transaksi	Rp25.000.000
	Keterangan: Kredit Konsumtif dengan BPJS Ketenagakerjaan JHT dengan Nomor 19038578191.	
3.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Eko Budi Setyawan
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Kepala Cabang
	Nama Pengambil Keputusan	Anton Purwanto
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Bisnis
	Jenis Transaksi	Perjanjian Kredit Tanggal 03/02/2025
	Nilai Transaksi	Rp20.000.000
	Keterangan: Kredit Konsumtif dengan jaminan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01735.	

Ada benturan kepentingan karena pihak pengurus PT. BPR Mitratama Arthabuana yang mempunyai transaksi pinjaman kredit

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	03 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Muhammad Bais Maulana
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Anak Dari Karyawan An. Muhammad Bais Maulana
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	03 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Pembelian Snack & Minuman Untuk Jamaah Haul Abah Guru Sekumpul
	Jumlah (Rp)	Rp446.500
3.	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Tanjung
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Pembelian Takjil Untuk Kegiatan Ramadhan Masyarakat Tanjung
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Handil Bakti
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Pembelian Takjil Untuk Kegiatan Ramadhan Masyarakat Handil Bakti
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Banjarmasin
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Pembelian Takjil Untuk Kegiatan Ramadhan 2025 Masyarakat Banjarmasin
	Jumlah (Rp)	Rp999.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Martapura
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Pembelian Takjil Untuk Kegiatan Ramadhan 2025 Masyarakat Martapura
	Jumlah (Rp)	Rp988.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Batulicin
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Pembelian Takjil Untuk Kegiatan Ramadhan 2025 Masyarakat Batulicin
	Jumlah (Rp)	Rp650.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Karyawan Bank Mitra
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Kegiatan Buka Puasa Bersama Karyawan Bank Mitra 2025
	Jumlah (Rp)	Rp30.690.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	14 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Muhammad Azimal
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ibu Mertua Dari Karyawan An. Muhammad Azimal
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	21 April 2025

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Namira
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Namira
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	02 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Rudy Darman
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Rudy Darman
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	06 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Polri Daerah KalSel
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Untuk Acara Gelar Seni PP Polri Daerah KalSel Tgl 23 Mei 2025
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	03 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Zaini
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Bapak Mertua Karyawan An. Zaini
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	16 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Akhmad Nahdi
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ibu Mertua Karyawan An. Akhmad Nahdi
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	23 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ronni Hidayat
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ayah Karyawan An. Ronni Hidayat
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	14 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Gusti Zada Nurhaliza
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Gusti Zada Nurhaliza
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
17.	Tanggal Pelaksanaan	30 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat

	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Untuk Acara HUT RI 80 & HUT Kabupaten Banjar 75
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
18.	Tanggal Pelaksanaan	08 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yulika Amelyani
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Yulika Amelyani
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	08 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Said Muhammad Luthfi
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Said Muhammad Luthfi
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
20.	Tanggal Pelaksanaan	11 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Barito Kuala
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Untuk Acara HUT RI ke 80 Kecamatan Alalak Barito Kuala
	Jumlah (Rp)	Rp150.000
21.	Tanggal Pelaksanaan	14 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Semangat Dalam
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Untuk Acara HUT RI Ke 80 Desa Semangat Dalam
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
22.	Tanggal Pelaksanaan	30 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Kabupaten Banjar
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Untuk HUT Bank Mitra ke 29 Tahun (Donor Darah & Hadiah)
	Jumlah (Rp)	Rp9.933.700
23.	Tanggal Pelaksanaan	02 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Tri Mulyani
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ibu Mertua Karyawan An. Tri Mulyani
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
24.	Tanggal Pelaksanaan	15 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Zainul Akbar
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Zainul Akbar
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000

25.	Tanggal Pelaksanaan	20 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Rizka Annisa Falmelia
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Kelahiran Anak Karyawan An. Rizka Annisa Falmelia
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
26.	Tanggal Pelaksanaan	17 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Rima Damayanti
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Rima Damayanti
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
27.	Tanggal Pelaksanaan	18 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Anton Purwanto
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ibu Mertua Karyawan An. Anton Purwanto
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
28.	Tanggal Pelaksanaan	20 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ryan Kurniawan
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Kelahiran Anak Karyawan An. Ryan Kurniawan
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
29.	Tanggal Pelaksanaan	26 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yoseph Jaya
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ibu Karyawan An. Yoseph Jaya
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
30.	Tanggal Pelaksanaan	08 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Muhammad Hafizi
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Muhammad Hafizi
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
31.	Tanggal Pelaksanaan	12 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Aceh
	Penjelasan Kegiatan	Biaya Penggalangan Dana Peduli Bencana Aceh FKLJK
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
32.	Tanggal Pelaksanaan	18 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

Penerima Dana	Febri Andrianova
Penjelasan Kegiatan	Biaya Sumbangan Kelahiran Anak Karyawan An. Febri Andrianova
Jumlah (Rp)	Rp1.500.000

Pemberian Dana Sosial di Tahun 2025

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kertak Hanyar, 23 April 2026

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER II TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Sangat Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Baik	Implementasi indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Baik	Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang dimiliki BPR adalah baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, dengan pencapaian baik.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Sangat Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, BPR tergolong sangat baik.

10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</i>
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.

c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, BPR tergolong baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 4. Implementasi indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik. 5. Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, dengan pencapaian baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, BPR tergolong sangat baik. 3. BPR memiliki indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yang dinilai baik. 4. BPR telah mengimplementasikan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sebagian Terpenuhi	Jumlah anggota Direksi hanya berjumlah 3 orang yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seharusnya jumlah direksi minimal sama dengan jumlah dewan komisaris yaitu sebanyak 4 orang.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dinilai telah terpenuhi.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, BPR memperlihatkan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	Indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dinilai telah terpenuhi.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.

9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Telah Terpenuhi	Indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, pada BPR indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, dengan penilaian baik.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Cukup Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, berjalan dengan cukup baik.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Baik	Penilaian terhadap indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, yang dimiliki BPR adalah baik.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, BPR tergolong baik.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	Implementasi indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, di BPR menunjukkan kondisi baik.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR dinilai baik.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan pencapaian baik.

18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Baik	BPR memiliki indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, yang dinilai baik.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Sangat Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Sangat Baik	Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, berjalan dengan baik.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Baik	Indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR saat ini dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki BPR adalah baik.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Baik	Implementasi indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, di BPR menunjukkan kondisi baik.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Sangat Baik	Indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, dinilai sangat baik.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, pada BPR berada dalam kondisi baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	Sehubungan jumlah direksi masih kurang maka hasil evaluasi menunjukkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dalam kondisi cukup baik.

28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sangat Baik	BPR memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai sangat baik.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	13 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 4 (Kurang Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor

Nilai 4 (Kurang Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Direksi memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Jumlah anggota Direksi hanya berjumlah 3 orang yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seharusnya jumlah direksi minimal sama dengan jumlah dewan komisaris yaitu sebanyak 4 orang.
- c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak terlaksana dengan baik.
- d. Direksi kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
- e. Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap sebagian temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif

	<ol style="list-style-type: none"> Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi. Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas Ditinjau dari sisi regulasi, BPR memperlihatkan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi. Indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dinilai telah terpenuhi. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah anggota Direksi hanya berjumlah 3 orang yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seharusnya jumlah direksi minimal sama dengan jumlah dewan komisaris yaitu sebanyak 4 orang.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, dengan penilaian baik. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, berjalan dengan cukup baik. Penilaian terhadap indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, yang dimiliki BPR adalah baik. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, BPR tergolong baik. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dimiliki BPR dinilai baik. Implementasi indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki BPR adalah baik. Implementasi indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, di BPR menunjukkan kondisi baik. Indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, dinilai sangat baik. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, pada BPR berada dalam kondisi baik. Sehubungan jumlah direksi masih kurang maka hasil evaluasi menunjukkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dalam kondisi cukup baik. BPR memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif



PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA
JL. A.Yani KM.6,3 No.6 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
Telepon: 05113255874
Website: www.bankmitra.co.id, Email: kp.banjar@bankmitra.co.id

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 4 orang dan Komisaris Independen adalah 50% dari total anggota Dewan Komisaris yaitu 2 orang sehingga sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</i>
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.</i>
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Telah Terpenuhi	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</i>
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>

10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dinilai baik.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Baik	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, dinilai baik.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	Implementasi indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, BPR tergolong baik.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Baik	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang dinilai baik.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sangat Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, berjalan dengan sangat baik.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Implementasi indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR berada dalam kondisi baik.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR dinilai sangat baik.

19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dinilai sangat baik.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Sangat Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dengan penilaian sangat baik.
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sangat Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR dinilai sangat baik.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dinilai sangat baik.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dengan penilaian baik.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		8 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	

Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	11 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginginkan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 4 orang dan Komisaris Independen adalah 50% yaitu 2 orang sehingga sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. BPR memiliki indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, yang dinilai telah terpenuhi. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktidak baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dinilai baik. Indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada BPR indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, dinilai baik. Implementasi indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR dinilai sangat baik. Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dinilai sangat baik. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dengan penilaian baik. Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR telah memiliki komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan komite Direksi belum dibentuk.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Cukup Baik	Penilaian terhadap indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Baik	Implementasi indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, di BPR menunjukkan kondisi baik.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, pada BPR dinilai baik.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, BPR tergolong baik.
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten, dengan pencapaian baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, pada BPR dinilai baik.

10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Baik	Indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, pada BPR indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, dinilai baik.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite, berjalan dengan baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif

	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR telah memiliki komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan komite Direksi belum dibentuk.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. 2. Implementasi indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, di BPR menunjukkan kondisi baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, pada BPR dinilai baik. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, BPR tergolong baik. 6. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten, yang dimiliki BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi, pada BPR dinilai baik. 2. Indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, pada BPR indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, dinilai baik. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Penilaian terhadap indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, yang dimiliki BPR adalah baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Sangat Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian sangat baik.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan penilaian baik.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	Penilaian terhadap indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, yang dimiliki BPR adalah baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	

Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.</p> <p>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.</p> <p>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian sangat baik.</p> <p>2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Penilaian terhadap indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Sebagian Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian sebagian terpenuhi.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sebagian Terpenuhi	Implementasi indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR berada dalam kondisi baik.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Baik	Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dinilai baik.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Baik	Indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, pada BPR saat ini dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Cukup Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, berjalan dengan cukup baik.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian sebagian terpenuhi. 2. Implementasi indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan

	kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dinilai baik. 3. Indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, pada BPR saat ini dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, berjalan dengan cukup baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan penilaian baik.</i>
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Sangat Baik	<i>Indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.</i>
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, BPR tergolong baik.</i>
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>

11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sangat Baik	Indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi. 4. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi. 5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai

	pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan penilaian baik. 2. Indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, BPR tergolong baik. 4. Penilaian terhadap indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai baik. 2. Indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sangat Baik	Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	Implementasi indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPR dinilai baik.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian sangat baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), dinilai sangat baik. 2. Implementasi indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPR dinilai baik. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme slesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme slesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik.
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, BPR tergolong baik.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	Penilaian terhadap indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dimiliki BPR adalah baik.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan pencapaian baik.

9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	Implementasi indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, di BPR menunjukkan kondisi baik.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, berjalan dengan baik.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Cukup Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan pencapaian cukup baik.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dimiliki BPR dinilai baik.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, BPR tergolong baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	12 Indikator

Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</p> <p>b. BPR telah memiliki dan menginginkan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ssesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, BPR tergolong baik. Penilaian terhadap indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang dimiliki BPR adalah baik.

	5. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, dengan pencapaian cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan dengan telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	Sangat Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dengan penilaian baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Sangat Baik	

Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan dengan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	Indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan telah terpenuhi.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, berjalan dengan baik.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Implementasi indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.

9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, berjalan dengan baik.
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, berjalan dengan baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		9 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan telah terpenuhi. Implementasi indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, berjalan dengan baik. Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. Indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik. Implementasi indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik. Penilaian terhadap indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan

	<p>prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, berjalan dengan baik.</p> <p>2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, berjalan dengan baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Penilaian terhadap indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, berjalan dengan telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, dengan pencapaian baik.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR adalah baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, berjalan dengan baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		1 Indikator	

Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. Penilaian terhadap indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, berjalan dengan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, dengan pencapaian baik. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, berjalan dengan baik.

2)	Faktor Negatif
	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 4 (Kurang Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 3 (Cukup Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik

Kesimpulan
<p>Kesimpulan Akhir Penilaian Tata Kelola Tata Kelola BPR termasuk dalam peringkat 3 (Cukup Baik) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut : a. Jumlah Direksi Semester II Tahun 2025 adalah 3 (tiga) orang, yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan Non Bank lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris. b. Jumlah Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang, yang 50% anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Independen. Seluruh Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. c. Semester II Tahun 2025 pemenuhan struktur organisasi yang belum kami penuhi adalah Direktur Bisnis d. Peran aktif Dewan Komisaris akan terus dilakukan dalam hal me-monitoring update Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR. e. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan). f. Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Risiko akan menjadi fokus kami mempertahankan kualitas kredit NPL, dan sektor ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, sehingga diperlukan perbaikan, review, dan evaluasi dalam hal manajemen risiko.</p>
Faktor Positif
<p>a. Faktor Positif Terkait Struktur dan Infrastruktur</p> <ol style="list-style-type: none"> Implementasi struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. Struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dinilai terpenuhi secara keseluruhan. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. <p>b. Faktor Positif Terkait Proses Penerapan Tata Kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai memadai.

3. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR dinilai memadai.
 4. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dimiliki BPR dinilai memadai.
 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian memadai.
 6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan pencapaian memadai.
 7. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai memadai.
 8. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai.
 9. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai.
 10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan pencapaian memadai.
 11. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai memadai.
 12. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai memadai.
- c. Faktor Positif Terkait Hasil Penerapan Tata Kelola
1. Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dinilai memadai.
 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi berjalan dengan memadai.
 3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai.
 4. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dimiliki BPR dinilai memadai.
 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian memadai.
 6. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
 7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.
 8. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai memadai.
 9. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
 10. Hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
 11. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian memadai.
 12. Implementasi hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR di BPR menunjukkan kondisi memadai.

Faktor Negatif

- 1) Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai masih terpenuhi sebagian; 2) Struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR saat ini dinilai masih terpenuhi sebagian
 2. Jumlah anggota Direksi masih belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga Implementasi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi belum maksimal
 3. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko masih dalam proses pemenuhan sehingga belum maksimal dalam pelaksanaan tugas
- b. Faktor Negatif Terkait Proses Penerapan Tata Kelola Nihil
- c. Faktor Negatif Terkait Hasil Penerapan Tata Kelola Nihil

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER II TAHUN 2025

Nama BPR : PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA
Alamat : JL. A.Yani KM.6,3 No.6 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
Nomor Telepon : 05113255874
Posisi Laporan : Semester II Tahun 2025
Modal Inti : Rp130.619.503.907
Total Aset : Rp476.529.471.353

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 4 (Kurang Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 3 (Cukup Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik

Kesimpulan

Kesimpulan Akhir Penilaian Tata Kelola Tata Kelola BPR termasuk dalam peringkat 3 (Cukup Baik) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut : a. Jumlah Direksi Semester II Tahun 2025 adalah 3 (tiga) orang, yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan Non Bank lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris. b. Jumlah Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang, yang 50% anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Independen. Seluruh Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. c. Semester II Tahun 2025 pemenuhan struktur organisasi yang belum kami penuhi adalah Direktur Bisnis d. Peran aktif Dewan Komisaris akan terus dilakukan dalam hal me-monitoring update Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR. e. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan). f. Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Risiko akan menjadi fokus kami mempertahankan kualitas kredit NPL, dan sektor ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, sehingga diperlukan perbaikan, review, dan evaluasi dalam hal manajemen risiko.

Faktor Positif

a. Faktor Positif Terkait Struktur dan Infrastruktur

1. Implementasi struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. Struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
5. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
6. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
7. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
8. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
9. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
11. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

b. Faktor Positif Terkait Proses Penerapan Tata Kelola

1. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai.
2. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai memadai.
3. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR dinilai memadai.
4. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dimiliki BPR dinilai memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan pencapaian memadai.
7. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai memadai.
8. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan pencapaian memadai.
11. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai memadai.
12. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai memadai.

c. Faktor Positif Terkait Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dinilai memadai.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi berjalan dengan memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai.
4. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dimiliki BPR dinilai memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian memadai.
6. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.
8. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai memadai.
9. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan

- Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
10. Hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
 11. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian memadai.
 12. Implementasi hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR di BPR menunjukkan kondisi memadai.

Faktor Negatif

- 1) Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai masih terpenuhi sebagian; 2) Struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR saat ini dinilai masih terpenuhi sebagian
 2. Jumlah anggota Direksi masih belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga Implementasi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi belum maksimal
 3. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko masih dalam proses pemenuhan sehingga belum maksimal dalam pelaksanaan tugas
- b. Faktor Negatif Terkait Proses Penerapan Tata Kelola Nihil
- c. Faktor Negatif Terkait Hasil Penerapan Tata Kelola Nihil

Kertak Hanyar, 23 Januari 2026

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA Semester II Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA selama semester II tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Kertak Hanyar, 23 Januari 2026

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

Disetujui



M. Hasan Basri
Direktur Kepatuhan



Mengetahui



Anwari
Komisaris Independen